



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# **KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAK FISIK TA 2019**

**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

Jakarta, Maret 2018

# Arti Penting dan Strategis Tahun 2019

Tahun 2019 adalah tahun politik, sehingga berimplikasi pada arah kebijakan dan penentuan program, kegiatan, dan anggaran

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir  
**PELAKSANAAN RPJMN 2015-2019**, sebagai:

- Penjabaran dari visi dan misi Presiden.
- Rencana pembangunan jangka menengah ketiga dari RPJPN 2005-2025.
- Pelaksanaan konsistensi arah pembangunan nasional.



Pelaksanaan **PEMILU SERENTAK 2019**:

- Pemilihan Legislatif (Pileg) Anggota DPR Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
- Pemilihan presiden (Pilpres).

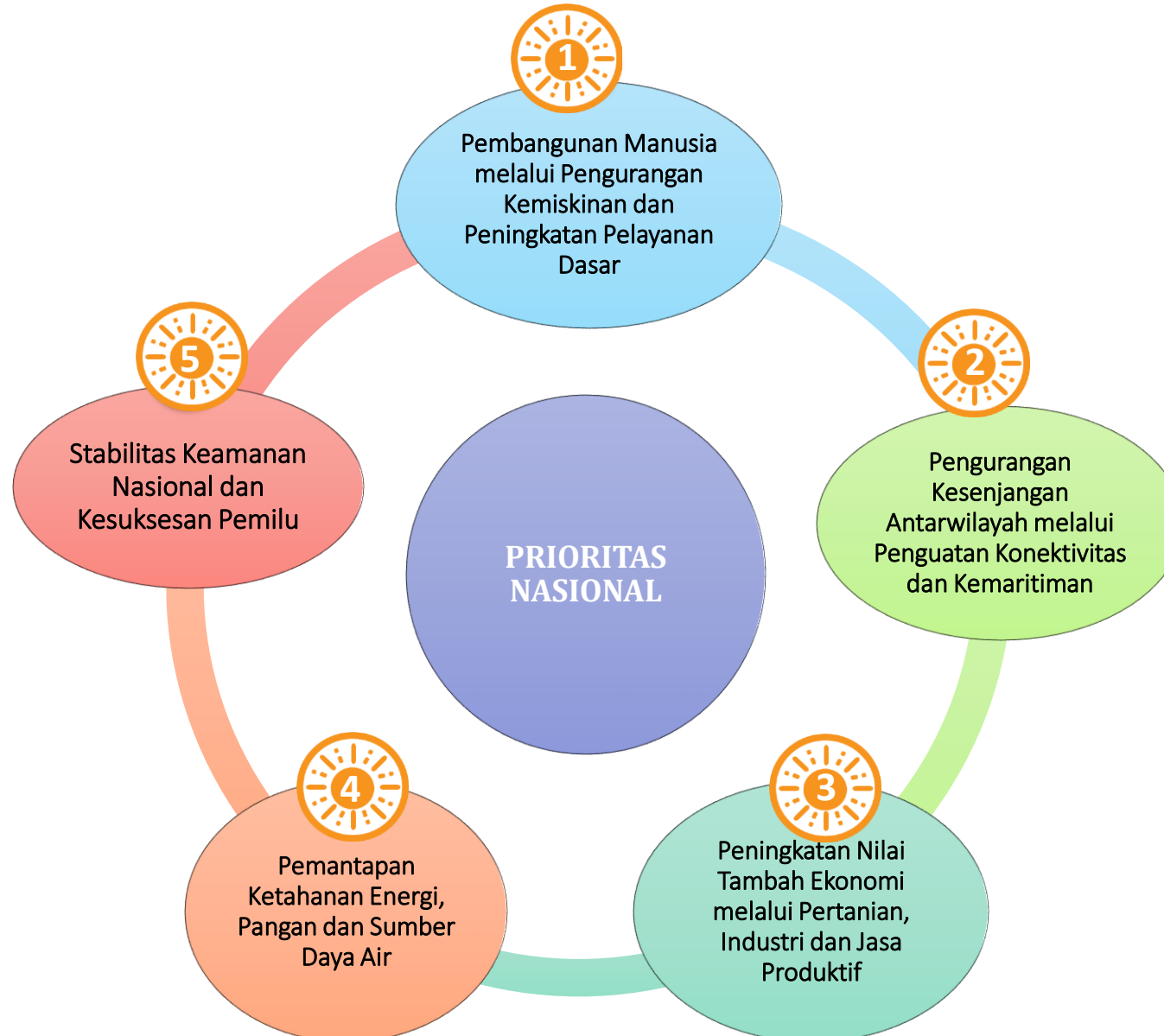


RAPBN sebagai implementasi kebijakan fiskal dirancang dengan:

- mempertimbangkan kondisi ekonomi, baik global maupun domestik;
- memperhitungkan risiko, tantangan dan masalah yang tengah dan akan dihadapi ke depan; dan
- memerhatikan outlook dan pencapaian sasaran RPJMN.



Indikator	2014* (Baseline)	2019
<b>Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>		
▪ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83	meningkat
<b>EKONOMI</b>		
<b>Ekonomi Makro</b>		
▪ Pertumbuhan ekonomi	5,1%	8 %
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010	43.325	71.975
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000	40.785	
▪ Inflasi	7,3%	3,5%
▪ Tingkat Kemiskinan	11,25% **	5-6%
▪ Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010	11,4%	16%
▪ Tingkat Pengangguran Terbuka	5,94%	4-5%



# Arah Kebijakan Fiskal 2019

## TEMA RKP 2019

Pemerataan  
Pembangunan  
untuk Pertumbuhan  
Berkualitas

## TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2019

Memantapkan  
Kebijakan Fiskal untuk  
Mendorong Investasi  
dalam rangka  
Mewujudkan  
Pertumbuhan yang  
Berkualitas

## FOKUS KEBIJAKAN FISKAL

### 1. Menjaga Kesehatan Fiskal

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1. Produktif | 3. Daya Tahan         |
| 2. Efisien   | 4. <i>Sustainable</i> |

### 2. Kebijakan Fiskal Mendorong Iklim Investasi

- To Help:** Simplifikasi dan kemudahan investasi;
- To Serve:** Peningkatan kualitas layanan publik;
- To Support:** Pemberian insentif fiskal untuk daya saing.

# Strategi Makro Fiskal 2019

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini, outlook 2018 dan arah kebijakan fiskal jangka menengah

## 1 Outlook 2018

- Berbasis kinerja perekonomian terkini dan APBN realisasi 2017;
- Proyeksi Asumsi Makro 2018;
- Analisis risiko APBN 2018.

## STRATEGI 2019



## 2 Tahun Politik 2019

- Fokus program perlindungan sosial dan padat karya;
- Melanjutkan infrastruktur
- Penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

### EKSPANSIF

### TERARAH DAN TERUKUR

1. Defisit semakin menurun (2,0-1,7)% PDB;
2. *Primary balance* menuju positif (0,4)-0,05 % PDB;
3. *Debt Ratio* 28,9-29,3% PDB

## A MOBILISASI PENDAPATAN YANG REALISTIS

Optimalisasi yang realistis:

1. Menjaga peningkatan trend *Tax Ratio*;
2. Penguatan pengelolaan SDA dan aset;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

## B

## PENAJAMAN BELANJA AGAR LEBIH PRODUKTIF

Memantapkan kualitas belanja agar efisien namun produktif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan:

1. Melanjutkan efisiensi belanja non-prioritas (belanja barang dan subsidi tepat sasaran serta sinergi antara K/L menghindari duplikasi);
2. Efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi (akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, sinergi antar program yang relevan);
3. Penguatan kualitas belanja produktif dan prioritas (penajaman untuk penguatan sektor kunci);
4. Penguatan kualitas pengelolaan TKDD untuk akselerasi pengurangan kesenjangan dan kemiskinan;
5. Antisipasi ketidakpastian dan menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan.

## C

## PEMBIAYAAN YANG EFISIEN DAN KREATIF

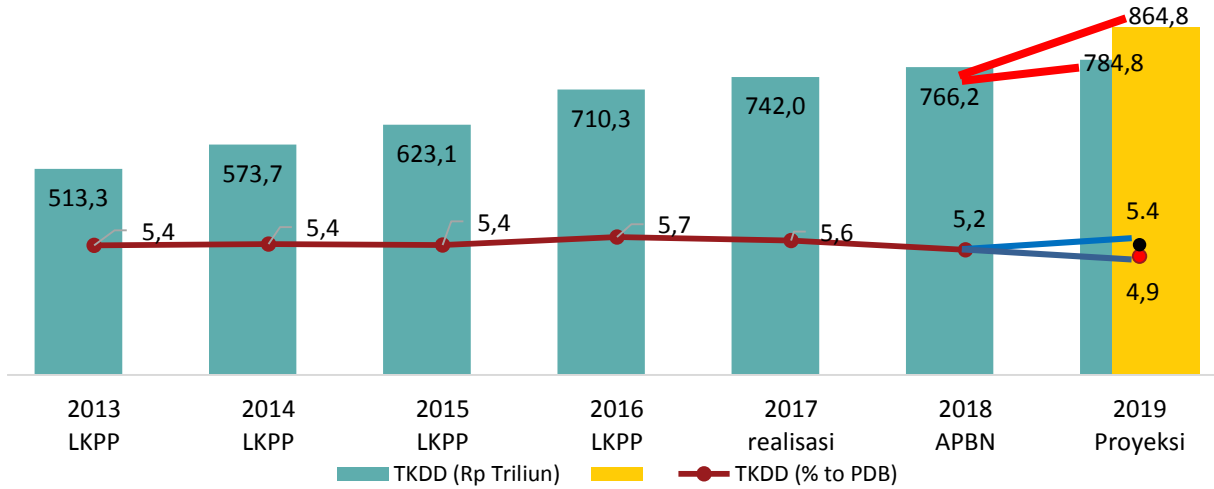
Terobosan pembiayaan yang inovatif:

1. Defisit dan Rasio utang terkendali dan diupayakan menurun dalam jangka menengah;
2. Keseimbangan primer menuju positif;
3. Mengembangkan pembiayaan kreatif.

Untuk Indonesia yang Lebih Baik

# PENGUATAN KUALITAS PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)

Alokasi TKDD yang semakin meningkat perlu diikuti dengan perbaikan distribusi dan kualitas pemanfaatan di daerah



## Alokasi TKDD 2013-2018

- TKDD cenderung meningkat dengan pertumbuhan rerata per tahun 8,3%.
- Besaran TKDD relatif terhadap PDB cenderung menurun → 2013: 5,4% ; 2018: 5,2%.
- TKDD merupakan instrumen utama pendanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal → 2013-2017 secara rerata per tahun TKDD mendanai 70,5% total belanja APBD.

Perkiraan alokasi 2019

4,9% - 5,4% dari PDB

Perkiraan PDB TA 2019

Rp16.000 Triliun

## Tantangan Pengelolaan TKDD

- 1 Keselarasan alokasi dengan kemampuan keuangan negara
- 2 Minimalisasi tumpang tindih pendanaan dengan belanja K/L
- 3 Pemanfaatan TKDD oleh daerah secara optimal
- 4 Menjaga stabilitas tahun politik 2019

## ARAH KEBIJAKAN TKDD 2019

Pengalokasian dan pengaturan TKDD yang mendorong penggunaan belanja Daerah secara efektif dan efisien, memegang prinsip *value for money* dan sinergi antar belanja pusat dan daerah.

### Penguatan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (proporsional dan sinkron)

#### Penguatan pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU)

- pengalokasian DAU sesuai kemampuan keuangan negara dan berdasarkan realisasi penerimaan negara
- pengaturan untuk infrastruktur daerah (25%) dan pemenuhan anggaran yang bersifat *mandatory*
- transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH

#### Penguatan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK)

- pengurangan kesenjangan layanan publik dasar antardaerah
- sinkronisasi perencanaan DAK
- peningkatan akurasi data dan biaya satuan DAK Nonfisik
- penyaluran DTK berdasarkan kinerja penyerapan dan pencapaian *output*

#### Penguatan pengelolaan DID, Otsus, dan Dais Yogyakarta

- penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD
- efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan D. I. Yogyakarta

#### Penguatan pengelolaan Dana Desa

- distribusi DD yang adil dan merata serta fokus pada pengentasan kemiskinan desa
- peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan DD untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi
- peningkatan alokasi dalam APBN hingga 10% dari TKD

yang l

# Arah Kebijakan DAK TA 2019

1. Mempertajam **sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL**, untuk menghindari pendanaan ganda kegiatan yang sama (*double funding*) dan tumpang tindih antar jenis pendanaan.
2. Penguatan proses sinkronisasi dengan **mengintegrasikan aplikasi perencanaan DAK Fisik kedalam aplikasi KRISNA** (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran);
3. Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan **berbasis usulan daerah (Proposal Based)**;
4. Mempertajam Menu Kegiatan DAK Fisik untuk dukungan penuntasan janji Presiden dan wakil Presiden;
5. Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan **pendekatan program (programmatic approach)** untuk program penanggulangan *Stunting*.





# Bidang DAK Fisik Tahun 2019

*\*hasil Rapat Pimpinan Bappenas pada 15 Januari 2018*

No	DAK Reguler 2018	Usulan DAK Reguler 2019	DAK Afirmasi 2018	Usulan DAK Afirmasi 2019	DAK Penugasan 2018	Usulan DAK Penugasan 2019
1	Pendidikan	Pendidikan	Air Minum	Air Minum	Air Minum	Air Minum
2	Kesehatan dan KB	Kesehatan dan KB	Kesehatan dan KB	Kesehatan	Irigasi	Irigasi
3	Jalan	Jalan	Pendidikan	Pendidikan	Jalan	Jalan
4	Air Minum	Air Minum	Perumahan dan Permukiman	Perumahan dan Permukiman	Kesehatan	Kesehatan
5	Sanitasi	Sanitasi	Sanitasi	Sanitasi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Perumahan dan Permukiman	Perumahan dan Permukiman	Transportasi	Transportasi	Pasar	Pasar
8	Industri kecil dan Menengah	Industri kecil dan Menengah			Pendidikan	Pendidikan
9	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan			Sanitasi	Sanitasi
11	Pertanian	Pertanian			Energi Skala Kecil	Pariwisata
10	Pariwisata	Pariwisata				
11	Pasar	Energi Skala Kecil				

✓ Tidak ada penambahan bidang DAK 2019, hanya dilakukan relokasi untuk beberapa bidang dengan pertimbangan kesesuaian dengan Arah Kebijakan RKP 2019

✓ Penambahan subbidang baru di bawah bidang Pendidikan untuk pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) dan Perpustakaan Daerah.



## Beberapa Pertimbangan

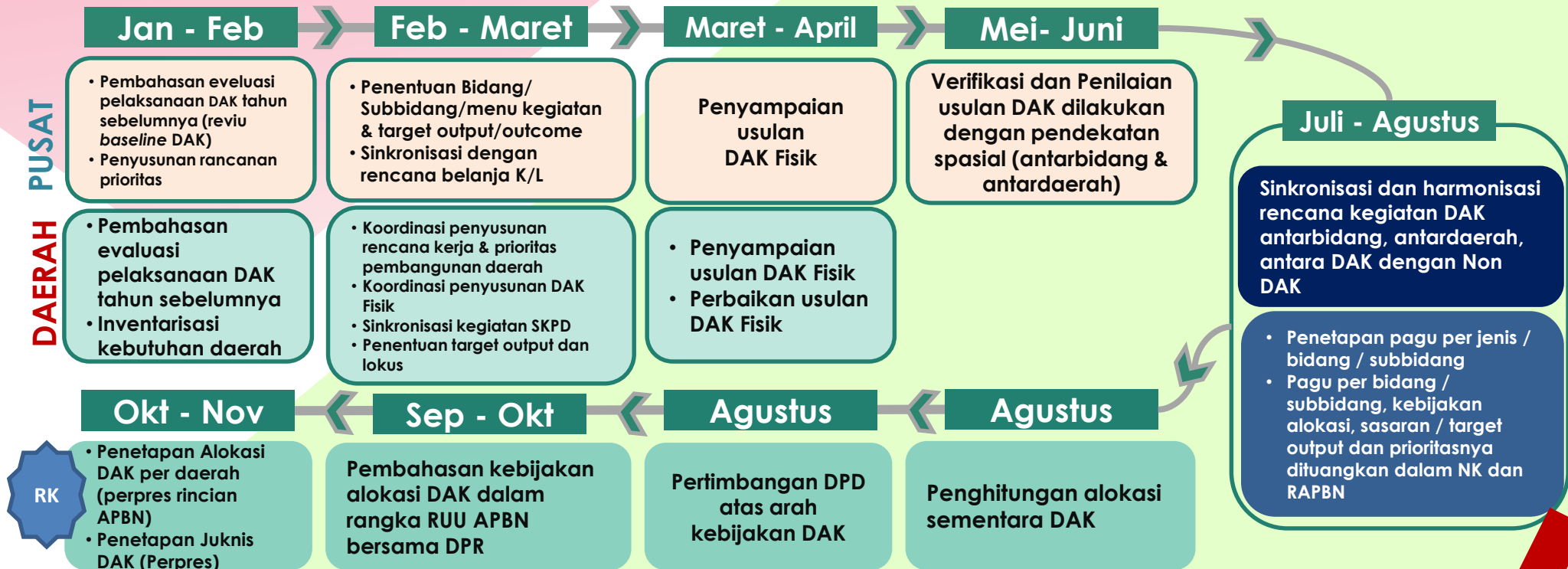
1. Merupakan periode **pemerintahan terakhir Kabinet Kerja** (2015-2019);
2. Restrukturisasi keseluruhan DAK lebih tepat dilaksanakan pada **periode RPJMN 2020-2025** setelah mengetahui **capaian dan dampak dari DAK tahun 2018 – 2019 (efektivitas kebijakan)**;
3. DAK 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan **pengusulan online** melalui aplikasi **e-planning DAK** sehingga dibutuhkan penyempurnaan baik dari sisi **proses** maupun **aplikasi** pada DAK 2019;
4. Perubahan yang terlalu signifikan setiap tahun membuat **daerah sulit memahami konsep DAK**;
5. Mempermudah **koordinasi** dan **pelaksanaan** serta **kesiapan perencanaan**;
6. Mengantisipasi perubahan **Perpres Juknis DAK (revisi Perpres 123)** agar tidak signifikan.



# PERTIMBANGAN DALAM PERANCANGAN BIDANG DAN MENU KEGIATAN DAK FISIK TA 2019

1. Kesesuaian bidang dengan pembagian jenis DAK Fisik (Reguler, Penugasan, dan Afirmasi);
2. Kebutuhan nasional dan dukungan prioritas nasional;
3. Dukungan untuk pemenuhan janji Presiden dan Wakil Presiden pada saat pemilihan presiden;
4. Pemilihan menu kegiatan yang mendukung program prioritas nasional dengan target capaian keluaran (output) dapat tercapai dalam satu tahun (proyek kegiatan tuntas dan dapat dimanfaatkan);
5. Pengintegrasian pelaksanaan beberapa bidang terkait dengan **pendekatan program (*programmatic approach*)**, misalnya untuk program penanggulangan *Stunting*.

# PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DAK FISIK



## PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT

### K/L Teknis

- Penilaian mengacu pada:
- data teknis usulan DAK;
  - perbandingan data teknis usulan daerah dengan data teknis K/L;
  - tingkat pencapaian SPM;
  - target output dan outcome:
    - jangka menengah;
    - per tahun secara nasional;
    - dari dana TP dan KP.

### Bappenas

- Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada:
- Data teknis Usulan DAK;
  - lokasi prioritas;
  - Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.

### Kemenkeu

- Menilai satuan biaya:
- Standar Biaya;
  - Indeks kemahalan konstruksi;
  - kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.

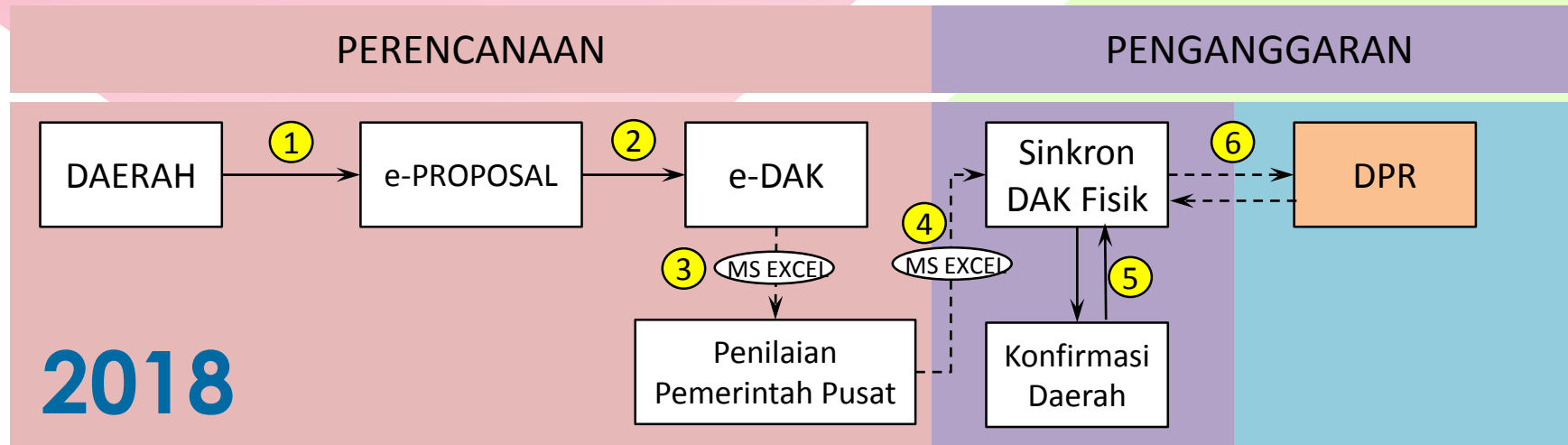
### Provinsi

- Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota
- Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi

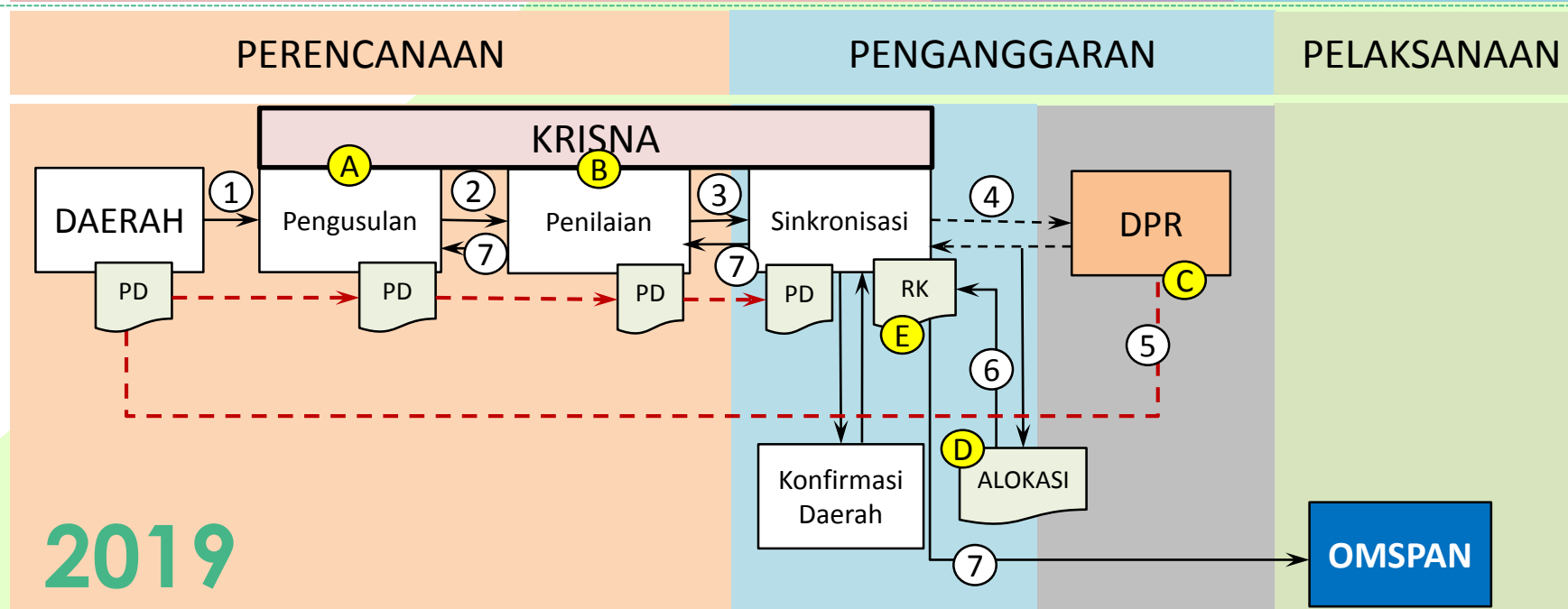
## URGENSI INTEGRASI APLIKASI DAK FISIK DENGAN KRISNA

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional mengamanatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah;
- Jenis transfer ke daerah yang harus tersinkronisasi dengan belanja pusat adalah Dana Transfer Khusus;
- Penganggaran program/kegiatan di daerah yang bersumber dari TKDD masih belum sinkron dengan penganggaran K/L di daerah, banyak daerah yang mendanai urusan pusat dan sebaliknya;
- Arahkan Presiden untuk melakukan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.
- KSP telah menyampaikan surat agar aplikasi perencanaan DAK Fisik terintegrasi dengan aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).

# Penyempurnaan Aplikasi Pengusulan dan Penilaian DAK Fisik Tahun 2019



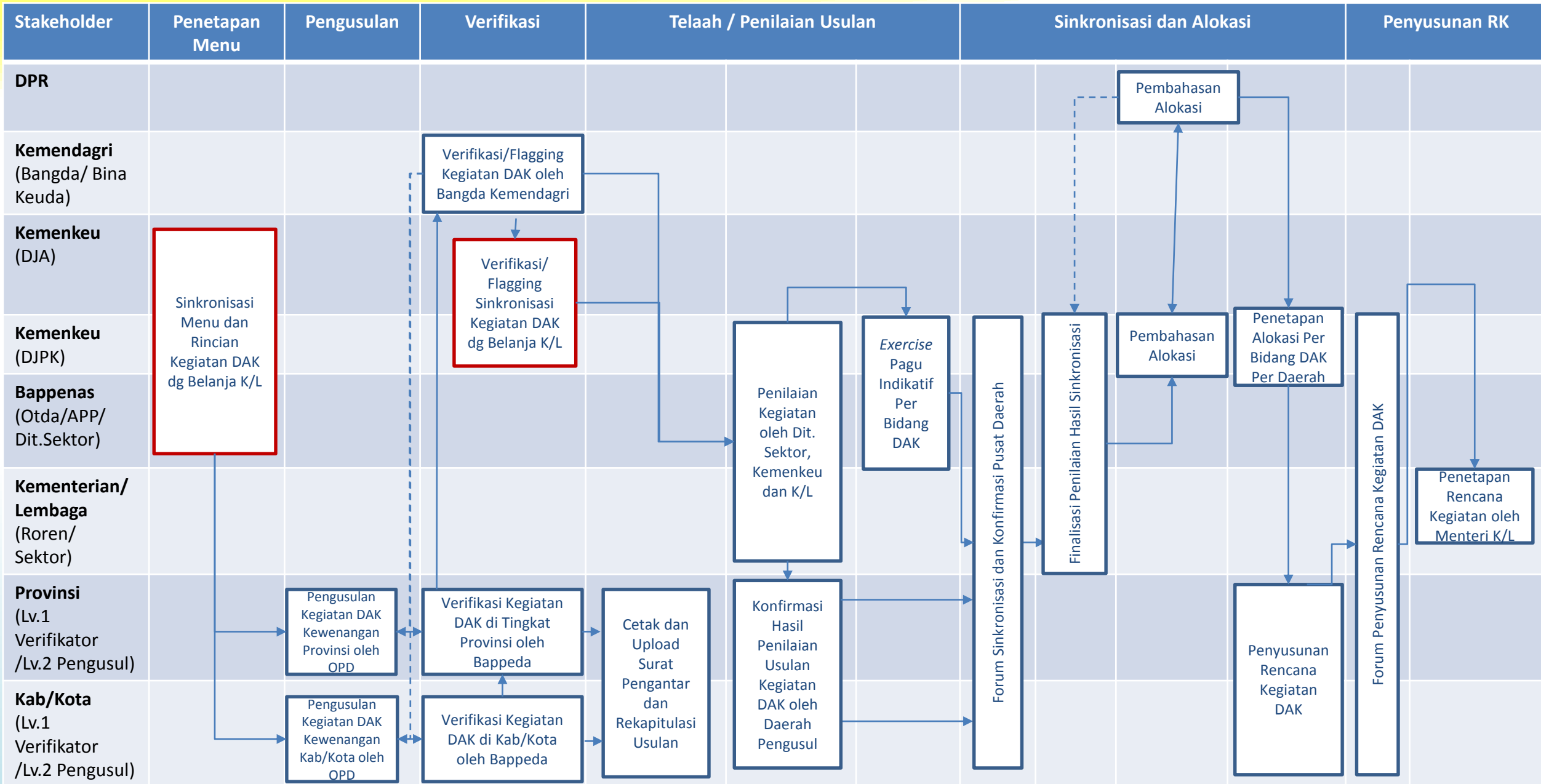
2018



2019

1. Menu dalam aplikasi akan disesuaikan dengan fitur **drop down list** sehingga **meminimalkan kesalahan pengisian menu** yang tidak sesuai dengan kesepakatan *Multilateral Meeting*;
2. Pengembangan **Sinkronisasi antara aplikasi E-Planning DAK dengan aplikasi serupa di K/L dan OMSPAN**, untuk mempermudah pengusulan, *data sharing*, dan penilaian usulan DAK;
3. Integrasi aplikasi Perencanaan DAK TA 2019: **e-planning DAK-KRISNA- SINKRON menjadi SATU APLIKASI KRISNA**
4. Pengembangan Integrasi Aplikasi **E-Planning DAK dan Sinkron-DAK dengan OMSPAN** untuk digunakan sebagai **instrumen monitoring dan evaluasi DAK**.
5. Kementerian Keuangan akan menyampaikan surat pemberitahuan terkait batas waktu pengusulan DAK Fisik 2019 kepada seluruh Pemerintah Daerah.

# Role-Sharing dalam Proses Perencanaan DAK 2019

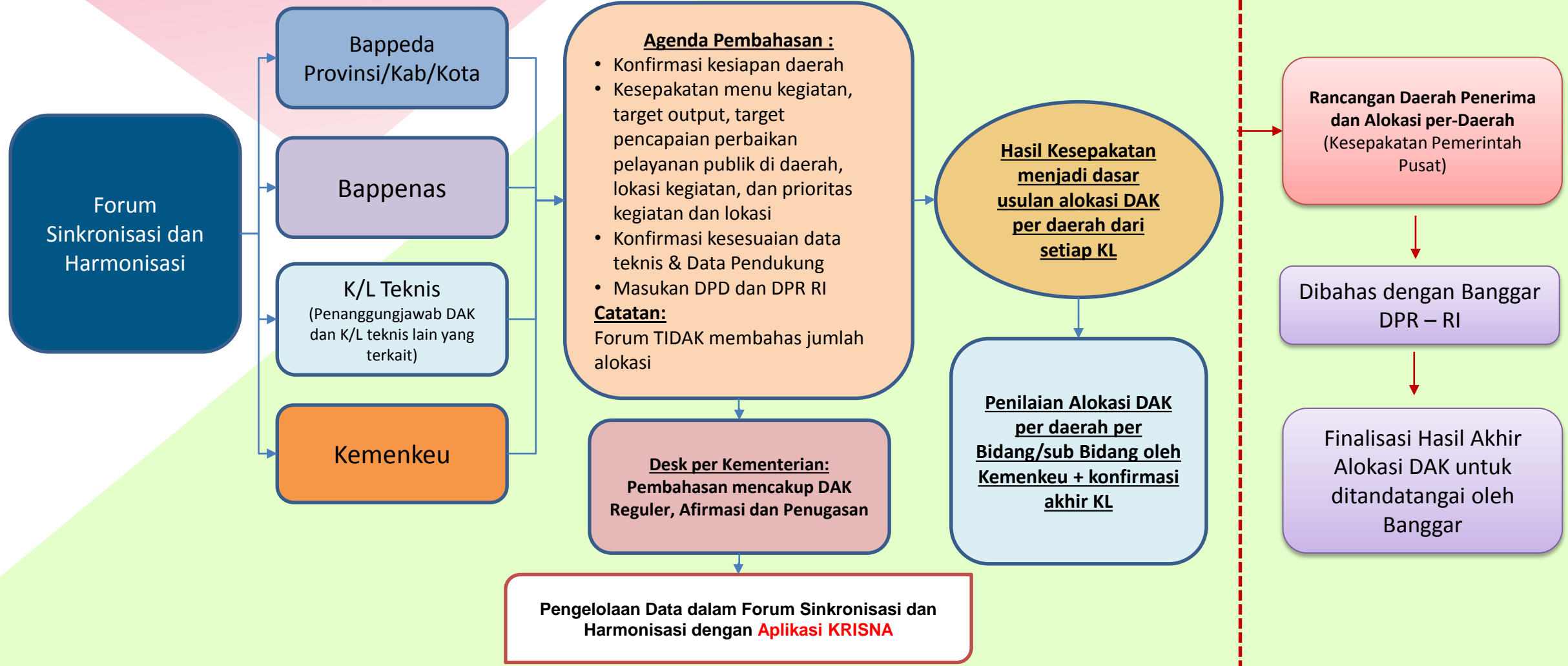


# User Role dalam Aplikasi DAK 2019

USER	Input/ Edit	Submit	Flagging	Approve /Discuss	Comment / Notes	View/ Unduh/ Print	Admin (User Mgt)	Super Admin	KETERANGAN
<b>User Role Daerah</b>									
<i>OPD Kab/Kota</i>	X					X			
<i>Bappeda Kab/Kota</i>	X	X				X	X		+ User Management
<i>OPD Provinsi</i>	X					X			
<i>Bappeda Provinsi</i>	X	X	X		X	X	X		
<i>Lainnya (Setda – Biro Adpem, Itda, BPKAD)</i>						X			
<b>User Role Pusat</b>									
<i>Bangda Kemendagri</i>			X		X	X			
<i>Keuda Kemendagri</i>						X			
<i>K/L Pengampu DAK</i>				X	X	X			
<i>DJPk Kemenkeu</i>				X	X	X	X	X	
<i>DJA Kemenkeu</i>					X	X			
<i>Bappenas Sektor</i>				X	X	X			
<i>Bappenas APP, PWK</i>						X			+ Data Management
<i>Bappenas Otda, Sisdur</i>						X	X	X	

# FORUM SINKRONISASI DAN HARMONISASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2018

## FORUM SINKRONISASI DAN HARMONISASI





# PERSYARATAN PENYALURAN DAK FISIK

PERPRES PERUBAHAN ATAS PERPRES 123 TAHUN 2016

## RENCANA KEGIATAN



- Rencana kegiatan yang telah disetujui oleh K/L Teknis dapat diubah **maksimal satu (1) kali** dengan batas waktu perubahan maksimal **bulan MARET**.
- Maksimal di sampaikan dalam aplikasi OM SPAN tanggal **21 Juli**

# FORMAT RENCANA KEGIATAN

## PERPRES PERUBAHAN ATAS PERPRES 123 TAHUN 2016

### RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2018

DAERAH : Kota XXXX  
 JENIS : Reguler  
 BIDANG : Kesehatan  
 PAGU  
 ALOKASI Rp 8.625.000.000

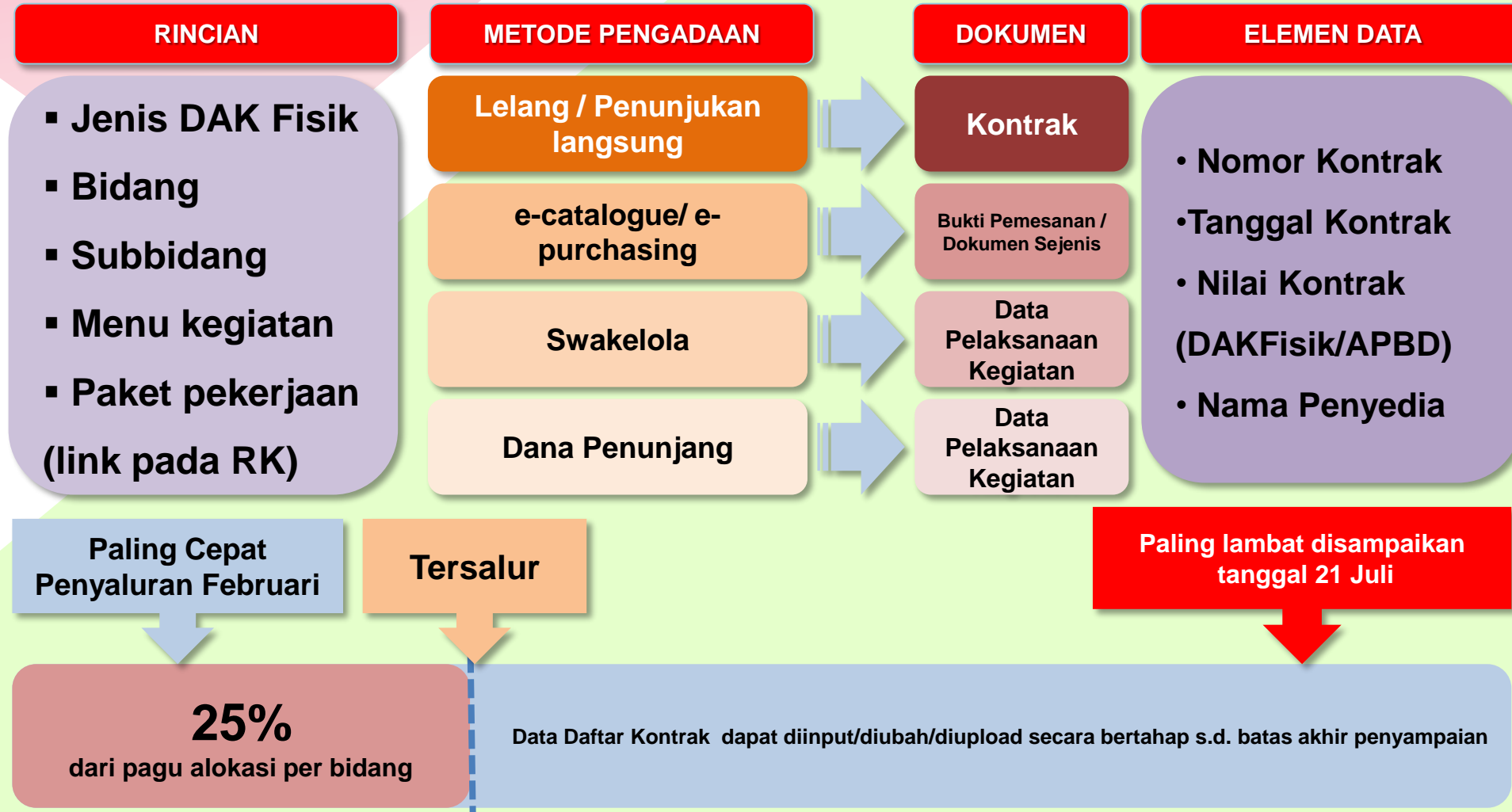
A. SUB  
 BIDANG : Kesehatan Dasar

NO	MENU KEGIATAN	NO	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
							VOLUME	SATUAN	DAK FISIK	APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Non-Afirmasi dan pendukungnya	1.	Pembangunan Puskesmas Kec. Sukajaya	Fisik	Pelelangan	Kec. Sukajaya, Desa Paya	1	Unit	Rp 2.500.000.000	
		2.	Pembelian Alat Kesehatan	Fisik	E-Katalog	Kec. Sukajaya, Desa Paya	1	Paket	Rp 500.000.000	
		3.	Konsultan Pengawas	Penunjang	Penunjukan Langsung	Kec. Sukajaya, Desa Paya	1	Orang	Rp 125.000.000	
2.	Penyediaan Prasarana puskesmas Non-Afirmasi	1.	Pengadaan Sistem Informasi Puskesmas Kec. Sukakarya	Fisik	Pelelangan	Kec. Sukakarya, Desa Kota Atas	1	Paket	Rp 1.000.000.000	
		2.								
		3.								
<b>TOTAL KEBUTUHAN DANA</b>									<b>Rp 4.125.000.000</b>	<b>Rp -</b>

# PERSYARATAN PENYALURAN DAK FISIK

“USER REQUIREMENT PENGEMBANGAN OM SPAN”

## DATA DAFTAR KONTRAK KEGIATAN



# MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK

PMK 112/PMK.07/2017 Ttg Perubahan PMK 50/PMK.07/2017

## Perubahan Penyaluran

### Besaran Penyaluran

#### Syarat:

- Perda APBD
- Laporan Realisasi Output TA/TW sebelumnya
- Minimal Penyerapan
- Minimal Output
- Kontrak Kegiatan
- Rencana kegiatan (RK) yg disetujui KL
- Laporan nilai rencana kebutuhan dana

#### Penyaluran:

- Paling Cepat
- Paling Lambat

#### Penyampaian Dokumen Paling Lambat

2018			2017			
Penyaluran melalui KPPN setempat			Penyaluran melalui KPPN setempat			
Thp I	Thp II	Thp III	TW I	TW II	TW III	TW IV
25%	45%	*	30%	25%	25%	*
√	-	-	√	-	-	-
√	√	√	√	√	√	√
-	75%	90%	-	75%	75%	90%
-	-	70%	-	-	30%	65%
√	-	-	-	√	-	-
√	-	-	-	-	-	-
-	-	√	-	√	-	-
Feb Juli	Apr Okt	Sept Des	Feb 31 Mei	Mei 8 Sep	Sep 31 Okt	Nov 31 Des
21 JULI	21 OKT	15 Des	19 Mei	31 Aug	21 Okt	15 Des



Penyaluran DAK Fisik bidang tertentu s.d Rp1 Milyar:

- ✓ Sekaligus paling cepat April paling lambat Juli sebesar nilai kebutuhan
- ✓ Persyaratan:
  - perda APBD TA berjalan;
  - laporan realisasi TA sebelumnya
  - Daftar kontrak kegiatan
- ✓ Batas penyampaian persyaratan 21 Juli
- ✓ Laporan realisasi kegiatan T Aberjalan paling lambat November.

Penyaluran DAK Fisik yang pembayarannya tidak bisa bertahap:

- ✓ K/L menyampaikan rekomendasi paling lambat Februari;
- ✓ Dibahas dan ditetapkan oleh Kemenkeu;
- ✓ Disalurkan sekaligus paling cepat Agustus dan paling lambat Desember;
- ✓ Persyaratan:
  - perda APBD TA berjalan;
  - laporan realisasi TA sebelumnya
  - Daftar kontrak kegiatan
  - Berita Acara Serah Terima
- ✓ Batas penyampaian persyaratan 21 Juli (selain Berita Acara Serah Terima)

#### Catatan:

- \* sebesar selisih antara dana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan

A light brown map of Indonesia is centered in the background. The text 'TERIMA KASIH' is overlaid on the map in a large, bold, black font. The entire scene is framed by a dark blue rounded rectangle.

**TERIMA KASIH**